**BAGIAN KEDUA: CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26**

**I. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI TETAP**

**1.1 DENGAN GAJI BULANAN**

I.1.1 Fajar Ariwibowo pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp 8.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00. Fajar Ariwibowo menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Fajar Ariwibowo dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Hitunglah PPh Pasal 21 bulan Januari ?

I.1.2 Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp. 8.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar Rp. 100.000 dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Januari 2015 Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji. Hitunglah PPh Pasal 21 bulan Januari 2016 ?

I.1.3 Agustina Indri adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Dharma Utama dengan gaji sebulan sebesar Rp7.500.000,00. Agustina Indri membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Agustina Indri berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Mei 2016 selain menerima pembayaran gaji juga menerima pembayaran atas lembur (*overtime*) sebesar Rp2.000.000,00. Hitunglah PPh Pasal 21 bulan Mei 2016 ?

1.1.4 Tuti Ratmini karyawati dengan status menikah dan mempunyai tiga anak bekerja pada PT Sinar Unggul. Suami dari Tuti Ratmini merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Tuti Ratmini menerima gaji Rp3.000.000,00 sebulan. PT Sinar Unggul mengikuti program pensiun dan jamsostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp40.000,00 sebulan. Tuti Ratmini juga membayar iuran pensiun sebesar Rp30.000,00 sebulan, disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Tuti Ratmini membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Maret 2016 disamping menerima pembayaran gaji Tuti Ratmini juga menerima uang lembur (overtime) sebesar Rp2.000.000,00. Hitunglah PPh Pasal 21 bulan Maret ?

I.1.5 dr. Danang Efriliansyah (menikah dan mempunyai 3 anak kandung) merupakan dokter spesialis kandungan yang bekerja sebagai pegawai tetap di rumah sakit swasta Sehat Tentrem dengan gaji tetap sebesar Rp20.000.000,00. Jam praktik dr. Danang Efriliansyah mulai pukul 8.00 s.d 12.00 selama 5 hari dalam seminggu. Untuk bulan Juni 2016 dr. Danang Efriliansyah menerima pembayaran dari Rumah Sakit Sehat Tentrem berupa gaji sebesar Rp20.000.000,00 dan menerima jasa medis sebagai dokter yang bersumber dari pasien sebesar Rp25.000.000,00. Dokter Danang Efriliansyah membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00 setiap bulannya. Hitunglah PPh Pasal 21 atas penghasilan dr. Danang Efriliansyah dari Rumah Sakit Tentrem pada bulan Juni adalah ?

**I.2 DENGAN GAJI MINGGUAN DAN GAJI HARIAN**

**Contoh-contoh perhitungan berikut ini hanya berlaku bagi pegawai tetap (bukan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas) yang gajinya dibayar secara mingguan atau harian.**

I.2.1 Contoh soal :

Marhentin Ika, belum menikah, pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada Perusahaan PT Mahagoni Gemilang menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp 1.500.000,00. Hitunglah PPh Pasal 21 bulan minggu pertama bulan April 2016 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja adalah?

I.2.2 Contoh Soal :

Nasrun Bramantyo pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Rejo Indonusa dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp 400.000,00. Nasrun Bramantyo kawin dan mempunyai seorang anak. PT Rejo Indonusa masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Rejo Indonusa membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Nasrun Bramantyo membayar iuran pensiun Rp25.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar Rp.75.000,00. PPh Pasal 21 sehari

**I.3 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN UANG RAPEL**

I.3.1 Fajar Ariwibowo sebagaimana tersebut dalam contoh nomor 1.1.1. di atas pada bulan Juni 2016 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 9.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Fajar Ariwibowo menerima rapel sejumlah Rp5.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2016). Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2016 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 terutangnya adalah :

**I.4 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN BERUPA: JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI, TUNJANGAN HARI RAYA ATAU TAHUN BARU, BONUS, PREMI, DAN PENGHASILAN SEJENIS LAINNYA YANG SIFATNYA TIDAK TETAP DAN PADA UMUMNYA DIBERIKAN SEKALI DALAM SETAHUN**

I.4.1 Contoh Soal :

Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 8.000.000,00 sebulan. Pada bulan Maret 2016 Joko Qurnain memperoleh bonus sebesar Rp5.000.000,00 sehingga pada bulan Maret 2016 Joko Qurnain memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar Rp 8.000.000,00 dan bonus sebesar Rp5.000.000,00. Setiap bulannya Joko Qurnain membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000,00. Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah:

**I.5 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI YANG DIPINDAHTUGASKAN DALAM TAHUN BERJALAN**

Pada saat pegawai dipindahtugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian dalam penghitungan PPh Pasal 21 tetap menggunakan dasar penghitungan selama setahun.

Contoh Perhitungan :

Agus Saparudin yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Nusantara Mandiri di Jakarta. Sejak 1 Juni 2016 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada 1 Oktober 2016 dipindahtugaskan lagi ke kantor cabang di Garut. Gaji Agus Saparudin sebesar Rp6.000.000,00 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah Rp100.000,00. Selama bekerja di PT Nusantara Mandiri Agus Saparudin hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. **Penghitungan PPh Psl 21 aaldah ?**

**I.6 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI YANG BERHENTI BEKERJA ATAU MULAI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN**

**I.6.1 Pegawai Baru Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan**

**I.6.1.1 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun.**

Contoh Pehitungan :

Budiyanta bekerja pada PT Xiang Malam sebagai pegawai tetap sejak 1 Juli 2016. Budiyanta belum menikah. Gaji sebulan adalah sebesar Rp 10.000.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp150.000,00. hitunglah PPh Pasal 21 untuk bulan Juli 2016 dalam hal Budiyanta hanya memperoleh penghasilan berupa gaji ?

**I.6.1.2 Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak, dan mulai bekerja pada tahun berjalan**

David Raisita (K/3) mulai bekerja 1 Juli 2016. la bekerja di Indonesia s.d. Agustus 2018. Selama Tahun 2016 menerima gaji per bulan Rp20.000.000,00 Penghitungan PPh Pasal 21 bulan juli tahun 2016 dalam hal David Raisita hanya menerima penghasilan berupa gaji adalah :

**I.6.2 Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan**

**I.6.2.1 Pegawai Yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Berhenti Bekerja**

**Pada Tahun Berjalan**

Contoh Perhitungan :

Arip Marwanto yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Mahakam Utama di Yogyakarta - DIY. Sejak 1 Juni 2016, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT Mahakam Utama. Gaji Arip Marwanto setiap bulan memperoleh sebesar Rp 10.000.000,00 dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah Rp100.000,00 setiap bulan. Selama bekerja di PT Mahakam Utama Arip Marwanto hanya menerima penghasilan berupa gaji saja.

**I.6.2.2 Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan dan Sekaligus Kehilangan**

**Kewajiban Pajak Subjektif**

Contoh Perhitungan :

Lewis Oshea (K/3) mulai bekerja Mei 2012 dan berhenti bekerja sejak 1 Juni 2016 dan meninggalkan Indonesia ke negara asalnya (kehilangan kewajiban pajak subjektif). Selama tahun 2016 menerima gaji perbulan sebesar Rp15.000.000,00

**I.8 PPh PASAL 21 SELURUH ATAU SEBAGIAN DITANGGUNG OLEH PEMBERI KERJA**

Contoh perhitungani :

Dalam hal PPh Pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan. Arip Mulyana adalah seorang pegawai dari PT Lautan Otomata dengan status belum menikah . Dia menerima gaji Rp6.000.000,00 sebulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp150.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Juli 2016 dalam hal Arip Mulyana hanya menerima pembayaran gaji saja adalah:

**I.9 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA TUNJANGAN PAJAK**

Dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

**Contoh penghitungan:**

Peri Irawan (status belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan) bekerja pada PT Kartika Kawashima Pionirindo dengan memperoleh gaji sebesar Rp5.000.000,00 sebulan. Kepada Peri Irawan diberikan tunjangan pajak sebesar Rp50.000,00. luran pensiun yang dibayar oleh Peri Irawan adalah sebesar Rp25.000,00 sebulan. PPh Pasal 21 bulan April 2016 dalam hal Peri Irawan tidak menerima penghasilan dari PT Kartika Kawashima Pionirindo selain gaji adalah:

**I.10 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK YANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILANNYA BERSIFAT FINAL ATAU BERDASARKAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS *(DEEMED PROFIT)***

Qalbun Junaidi adalah warga negara RI yang bekerja pada suatu perwakilan dagang asing yang pengenaan pajaknya menggunakan norma penghitungan khusus *(deemed profit),* pada bulan April 2016 memperoleh gaji sebesar Rp 5.000.000,00 sebulan beserta beras 50 kg dan gula 10 kg. Qalbun Junaidi berstatus belum menikah. Nilai uang dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar yaitu :hrga beras Rp 10.000,00 per kg ; harga gula Rp 8.000,00 per kg

**I.11 PERHITUNGAN PPH PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP YANG BARU MEMILIKI NPWP PADA TAHUN BERJALAN**

Contoh Perhitugan :

Wahyu Santosa, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Fajar Sejahtera dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000,00. Wahyu Santosa baru memiliki NPWP pada bulan Juni 2016 dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada PT Fajar Sejahtera untuk digunakan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 21 bulan Juni. Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Januari-Mei 2016 adalah sebagai berikut:

**II. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS UANG PENSIUN YANG DIBAYARKAN SECARA BERKALA (BULANAN)**

**II.1 Penghitungan PPh Pasal 21 Pada Tahun Pertama Dibayarkannya Uang Pensiun Secara Bulanan**

II.1.1 **Penghitungan PPh Pasal 21 di Tempat Pemberi Kerja Sebelum Pensiun**

Apabila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun, misalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku di tempat pemberi kerja yang dikaitkan dengan usia pegawai yang bersangkutan, maka penghitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang akan diperoleh dalam periode dimana pegawai yang bersangkutan akan bekerja dalam tahun berjalan sebelum memasuki masa pensiun.

Namun, apabila waktu pensiun belum dapat diketahui dengan pasti pada waktu menghitung PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada perkiraan penghasilan neto setahun seperti pada ContohPenghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan.

Contoh Perhitungan :

Hari Irawan, berstatus kawin dengan 2 (dua) orang anak yang masih menjadi tanggungan, bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Nusa lndah Gemilang dengan gaji sebulan sebesar Rp6.000.000,00. Hari Irawan setiap bulan membayar iuran pensiun sebesar Rp250.000,00 ke Dana Pensiun Artha Mandiri yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT Nusa Indah Gemilang terhitung mulai 1 Juli 2016, Hari Irawan akan memasuki masa pensiun.

**Pada saat Hari Irawan berhenti bekerja dan memasuki masa pensiun, maka pemberi kerja memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) dengan data sebagai berikut :**

**II.1.2 Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun yang Membayarkan Uang Pensiun Bulanan.**

Untuk kemudahan dan kesederhanaan bagi pegawai yang pensiun dalam hal yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan selain dari pekerjaan dari satu pemberi kerja dan uang pensiun, Dana Pensiun menghitung pemotongan PPh Pasal 21 atas uang pensiun pada tahun pertama pegawai menerima uang pensiun dengan berdasarkan pada gunggungan penghasilan neto dari pemberi kerja sampai dengan pensiun dan perkiraan uang pensiun yang akan diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan. Agar Dana Pensiun dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 21 seperti itu, maka penerima pensiun harus segera menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A-1/1721 A-2) dari pemberi kerja sebelumnya.

Melanjutkan contoh sebelumnya, Selanjutnya, mulai bulan Juli 2015 Hari Irawan memperoleh uang pensiun dari Dana Pensiun Artha Mandiri sebesar Rp 4.000.000,00 sebulan. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas uang pensiun adalah sebagai berikut :

**II.2 Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pembayaran Uang Pensiun Secara Bulanan Pada Tahun Kedua dan Seterusnya.**

Dengan menggunakan contoh sebelumnya, penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan mulai Januari 2016 (tahun kedua yang bersangkutan pensiun) adalah sebagai berikut :

**III PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS, PENERIMA UPAH SATUAN, DAN PENERIMA UPAH BORONGAN**

**III.1 DENGAN UPAH HARIAN**

Nurcahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2016 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. la bekerja selama 20 hari dan menerima upah harian sebesar Rp450.000,00. ?

**IV PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI YANG DITERIMA MANTAN PEGAWAI, HONORARIUM KOMISARIS YANG BUKAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP DAN PENARIKAN DANA PENSIUN OLEH PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI**

Contoh :

Penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan kepada mantan pegawai.

Victoria Endah bekerja pada PT Fajar Wisesa. Pada tanggal 1 Januari 2016 telah berhenti bekerja pada PT Fajar Wisesa karena pensiun. Pada bulan Maret 2016 Victoria Endah menerima jasa produksi tahun 2015 dari PT Fajar Wisesa sebesar Rp55.000.000,00. ?

Contoh :

Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium komisaris yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap. Aulia Rais adalah seorang komisaris di PT Media Primatama, yang bukan sebagai pegawai tetap. Dalam tahun 2015, yaitu bulan Juli 2016 menerima honorarium sebesar Rp 60.000.000,00 ?

Contoh :

penghitungan PPh Pasal 21 penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Nicholas Sinulingga adalah pegawai PT Abadi Sejahtera menerima gaji Rp2.000.000,00 sebulan. PT Abadi Sejahtera mengikuti program pensiun untuk para pegawainya. PT Abadi Sejahtera membayar iuran dana pensiun untuk Nicholas Sinulingga sebesar Rp100.000,00 sebulan ke Dana Pensiun Abadi Sejahtera, yang merupakan dana pensiun yang dibentuk bagi pengelolaan uang pensiun pegawai PT Abadi Sejahtera yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nicholas Sinulingga membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama sebesar Rp50.000,00 sebulan. Bulan Februari 2016 Nicholas Sinulingga memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya maka ia mengambil iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp20.000.000,00. Kemudian pada bulan Mei 2016 ia menarik lagi dana sebesar Rp15.000.000,00. Kemudian bulan Juli 2016 untuk keperluan lainnya ia menarik lagi dana sebesar Rp25.000.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang adalah ?

**V. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI.**

**V.1 CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHASILAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN**

Contoh :

penghitungan PPh Pasal 21 atas jasa dokter yang praktik di rumah sakit dan/atau klinik dr. Abdul Gopar, Sp.JP merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Abdul Gopar, Sp.JP pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dr. Abdul Gopar, Sp.JP juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. dr. Abdul Gopar, Sp.JP telah memiliki NPWP dan pada tahun 2016, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik dr. Abdul Gopar, SP.JP di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat adalah sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Bulan | Jasa Dokter yang dibayar Pasien  (Rupiah) |
| Januari | 45.000.000,00 |
| Februari | 49.000.000,00 |
| Maret | 47.000.000,00 |
| April | 40.000.000,00 |
| Mei | 44.000.000,00 |
| Juni | 52.000.000,00 |
| Juli | 40.000.000,00 |
| Agustus | 35.000.000,00 |
| September | 45.000.000,00 |
| Oktober | 44.000.000,00 |
| November | 43.000.000,00 |
| Desember | 40.000.000,00 |
| Jumlah | 524.000.000,00 |

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2016:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bulan | Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah) | Dasar Pemotongan PPh Pasal 21  (Rupiah) | Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rupiah) | Tarif Pasal  17 ayat (1) huruf a UU PPh | PPh Pasal 21 terutang (Rupiah) |
| (1) | (2) | (3)=50%X(2) | (4) | (5) | (6)=(3) x (5) |
| Januari | 45.000.000,00 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 5% | 1.125.000,00 |
| Februari | 49.000.000,00 | 24.500.000,00 | 47.000.000,00 | 5% | 1.225.000,00 |
| Maret | 47.000.000,00 | 3.000.000,00  ------------  20.500.000,00 | 50.000.000,00  -------------  70.500.000,00 | 5%  ------  15% | 150.000,00  ----------  3.075.000,00 |
| April | 40.000.000,00 | 20.000.000,00 | 90.500.000,00 | 15% | 3.000.000,00 |
| Mei | 44.000.000,00 | 22.000.000,00 | 112.500.000,00 | 15% | 3.300.000,00 |
| Juni | 52.000.000,00 | 26.000.000,00 | 138.500.000,00 | 15% | 3.900.000,00 |
| Juli | 40.000.000,00 | 20.000.000,00 | 158.500.000,00 | 15% | 3.000.000,00 |
| Agustus | 35.000.000,00 | 17.500.000,00 | 176.000.000,00 | 15% | 2.625.000,00 |
| September | 45.000.000,00 | 22.500.000,00 | 198.500.000,00 | 15% | 3.375.000,00 |
| Oktober | 44.000.000,00 | 22.000.000,00 | 220.500.000,00 | 15% | 3.300.000,00 |
| November | 43.000.000,00 | 21.500.000,00 | 242.000.000,00 | 15% | 3.225.000,00 |
| Desember | 40.000.000,00 | 8.000.000,00  ------------  12.000.000,00 | 250.000.000,00  -------------  262.000.000,00 | 15%  ------  25% | 1.200.000,00  -------------  3.000.000,00 |
| Jumlah | 524.000.000,00 | 262.000.000,00 |  |  | 35.500.000,00 |

Apabila dr. Abdul Gopar Sp.JP tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 21 terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 terutang sebagaimana contoh di atas.

V.1.b. Contoh :

perhitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada petugas dinas luar asuransi bukan sebagai pegawai perusahaan asuransi) Neneng Hasanah adalah petugas dinas luar asuransi dari PT. Tabaru Life. Suami Neneng Hasanah telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan mempunyai NPWP, dan yang bersangkutan bekerja pada PT. Kersamanah. Neneng Hasanah telah menyampaikan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Neneng Hasanah hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabarru Life. Pada tahun 2016, penghasilan yang diterima oleh Neneng Hasanah sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT. Tabarru Life adalah sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Bulan | Bulan Komisi agen (Rupiah) |
| Januari | 38.000.000,00 |
| Februari | 38.000.000,00 |
| Maret | 41.000.000,00 |
| April | 42.000.000,00 |
| Mei | 44.000.000,00 |
| Juni | 45.000.000,00 |
| Juli | 45.000.000,00 |
| Agustus | 48.000.000,00 |
| September | 50.000.000,00 |
| Oktober | 52.000.000,00 |
| November | 55.000.000,00 |
| Desember | 56.000.000,00 |
| Jumlah | 554.000.000,00 |

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2015 adalah:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bulan | Penghasilan Bruto (Rupiah) | 50% dari Penghasilan Bruto | PTKP (Rupiah) | Penghasilan Kena Pajak (Rupiah) | Penghasilan Kena Pajak Kumulatif (Rupiah) | Tarif  Pasal  17 ayat (1) Huruf a UU PPh | PPh Pasal 21 terutang (Rupiah) |
| (1) | (2) | (3)=50%X(2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(5)x(7) |
| Januari | 38.000.000,00 | 19.000.000,00 | 4.500.000,00 | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 5% | 725.000,00 |
| Februari | 38.000.000,00 | 19.000.000,00 | 4.500.000,00 | 14.500,000,00 | 29.000.000,00 | 5% | 725.000,00 |
| Maret | 41.000.000,00 | 20.500.000,00 | 4.500.000,00 | 16.000.000,00 | 45.000.000,00 | 5% | 800.000,00 |
| April | 42.000.000,00 | 21.000.000,00 | 4.500.000,00 | 5.000.000,00 | 50.000.000.000,00 | 5% | 25.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11.500.000,00 | 61.500.000,00 | 15 % | 1.725.000,000,00 |
| Mei | 44.000.000,00 | 22.000.000,00 | 4.500.000,00 | 17.500.000,00 | 79.000.000,00 | 15% | 2.625.000,00 |
| Juni | 45.000.000,00 | 22.500.000,00 | 4.500.000,00 | 18.000.000,00 | 97.000.000,00 | 15% | 2.700.000,00 |
| Juli | 45.000.000,00 | 22.500.000,00 | 4.500.000,00 | 18.000.000,00 | 115.000.000,00 | 15% | 2.700.000,00 |
| Agustus | 48.000.000,00 | 24.000.000,00 | 4.500.000,00 | 19.500.000,00 | 134.500.000,00 | 15% | 2.925.000,00 |
| September | 50.000.000,00 | 25.000.000,00 | 4.500.000,00 | 20.500.000,00 | 155.000.000,00 | 15% | 3.075.000,00 |
| Oktober | 52.000.000,00 | 26.000.000,00 | 4.500.000,00 | 21.500.000,00 | 176.500.000,00 | 15% | 3.225.000,00 |
| November | 55.000.000,00 | 27.500.000,00 | 4.500.000,00 | 23.000.000,00 | 199.500.000.000,00 | 15% | 3.450.000,00 |
| Desember | 56.000.000,00 | 28.000.000,00 | 4.500.000,00 | 23.500.000,00 | 223.000.000,00 | 15 % | 3.525.000,00 |
|  |  |  |  |
| Jumlah | 554.000.000,00 | 277.000.000,00 |  |  |  |  | 38.225.000,00 |

Dalam hal Neneng Hasanah tidak dapat menunjukkan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga dan Neneng Hasanah sendiri tidak memiliki NPWP, maka perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan sebagaimana contoh di atas namun tidak memperoleh pengurangan PTKP setiap bulan, dan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang dari yang memiliki NPWP sebagaimana penghitungan berikut ini:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xx  Bulan | Penghasilan Bruto (Rupiah) | Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah) | Dasar Pemotongan PPh Pasal 21  Kumulatif  (Rupiah) | Tarif Pasal 17 ayat (1) Huruf a UU PPh | Tarif tidak memiliki NPWP | PPh Pasal 21 terutang (Rupiah) |
| (1) | (2) | (3)=50%X(2) | (4) | (5) | (6) | (7)=(3)X(5)x(6) |
| Januari | 38.000.000,00 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 5% | 120% | 1.140.000,00 |
| Februari | 38.000.000,00 | 19.000.000,00 | 38.000.000,00 | 5% | 120% | 1.140.000,00 |
| Maret | 41.000.000,00 | 12.000.000,00  -------------  8.500.000,00 | 50.000.000,00  -------------  58.500.000,00 | 5%  ------  15% | 120%  --------  120% | 720.000,00  ------------  1.530.000,00 |
| April | 42.000.000,00 | 21.000.000,00 | 79.500.000,00 | 15% | 120% | 3.780.000,00 |
| Mei | 44.000.000,00 | 22.000.000,00 | 101.500.000,00 | 15% | 120% | 3.960.000,00 |
| Juni | 45.000.000,00 | 22.500.000,00 | 124.000.000,00 | 15% | 120% | 4.050.000,00 |
| Juli | 45.000.000,00 | 22.500.000,00 | 146.500.000,00 | 15% | 120% | 4.050.000,00 |
| Agustus | 48.000.000,00 | 24.000.000,00 | 170.500.000,00 | 15% | 120% | 4.320.000,00 |
| September | 50.000.000,00 | 25.000.000,00 | 195.500.000,00 | 15% | 120% | 4.500.000,00 |
| Oktober | 52.000.000,00 | 26.000.000,00 | 221.500.000,00 | 15% | 120% | 4.680.000,00 |
| November | 55.000.000,00 | 27.500.000,00 | 249.000.000,00 | 15% | 120% | 4.950.000,00 |
| Desember | 56.000.000,00 | 1.000.000,00  ---------------  27.000.000,00 | 250.000.000,00  -------------  277.000.000,00 | 15%  --------  25% | 120%  --------  120% | 180.000,00  ------------  8.100.000,00 |
| Jumlah | 554.000.000,00 | 277.000.000,00 |  |  |  | 47.100.000,00 |

Dalam hal suami Neneng Hasanah atau Neneng Hasanah sendiri telah memiliki NPWP, tetapi Neneng Hasanah mempunyai penghasilan lain di luar kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, maka perhitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagaimana contoh di atas, namun tidak dikenakan tariff 20% lebih tinggi karena yang bersangkutan atau suaminya telah memiliki NPWP.

**V.2 CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN.**

Nashrun Berlianto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia dengan fee sebesar Rp5.000,000,00. Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah ebesar:

5% x 50% Rp5.000.000,00 = Rp125.000,00

Dalam hal Nashrun Berlianto tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar:

120% x 5% x 50% Rp5.000.000,00 = Rp150.000,00

**V.3 CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI, SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN JASA YANG DALAM PEMBERIAN JASANYA MEMPEKERJAKAN ORANG LAIN SEBAGAI PEGAWAINYA DAN/ATAU MELAKUKAN PENYERAHAN MATERIAL/BAHAN**

Arip Nugraha melakukan jasa perawatan AC kepada PT Wahana Jaya dengan imbalan Rp10.000.000,00. Arip Nugraha mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp180.000,00. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp4.500.000,00. selain itu, Arip Nugraha membeli spare part AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar Rp1.000.000,00.

**Penghitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut**:

a. Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Arip Nugraha, dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Arip Nugraha dan biaya untuk membeli spare part AC, maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya atas imbalan yang diberikan kepada Arip Nugraha adalah sebesar imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Arip Nugraha dan biaya spare part AC, sebagaimana dalam contoh adalah sebesar:

Rp10.000.000,00 - Rp4.500.000,00 - Rp1.000.000,00 = Rp4.500.000,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya atas penghasilan yang diterima Arip Nugraha adalah sebesar:

5% x 50% x Rp4.500.000,00 = Rp112.500,00

Dalam hal Arip Nugraha tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya menjadi:

120% x 5% x 50% x Rp4.500.000,00 = Rp135.000,00

b. Dalam hal PT Wahana Jaya tidak memperoleh informasi berdasarkan perjanjian yang dilakukan atau dokumen yang diberikan oleh Arip Nugraha mengenai upah yang harus dikeluarkan Arip Nugraha atau pembelian material/bahan, PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya adalah jumlah sebesar :

5% x 50% x Rp10.000.000,00 = Rp250.000,00

Dalam hal Arip Nugraha tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya menjadi:

120% x 5% x 50% x Rp10.000.000,00 = Rp300.000,00

Catatan:

Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Arip Nugraha.

**VI. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA PESERTA KEGIATAN.**

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 :

Sony Amaros adalah seorang atlet bulutangkis professional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. la menjuarai turnamen Indonesia *Grand Prix Gold* dan memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia *Grand Prix Gold* tersebut adalah:

5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% x Rp150.000.000,00 = Rp 22.500.000,00

Rp 25.000.000,00

**VII. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPEROLEH GAJI SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DALAM MATA UANG ASING**

a. Dalam hal pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri memperoleh gaji sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing sebelum PPh dihitung terlebih dahulu harus dikonversi dalam mata uang rupiah.

b. PPh Pasal 26 yang terutang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan bruto, dan tidak boleh diperhitungkan pengurangan-pengurangan seperti biaya jabatan dan PTKP.

Contoh Russel Frederiksen adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. la memperoleh gaji pada bulan Maret 2016 sebesar US$2,500 sebulan. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah Rp11.500,00 untuk US$ 1.00.

Penghitungan PPh Pasal 26:

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan adalah: US$2,500 x Rp11.500,00 = Rp28.750.000,00

PPh Pasal 26 terutang adalah: 20% x Rp28.750.000,00 = Rp5.750.000,00